



---

## Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara

Yudhi Dharmansyah<sup>1)</sup>, Fatchur Rohman<sup>2)</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara <sup>1,2)</sup>  
131120001096@unisnu.ac.id<sup>1)</sup>, fatchur@unisnu.ac.id<sup>2)</sup>

---

### *Abstract*

*This study aims to examine the effect of planning documents, administrative records, human resource competencies, procurement documents, and money supply on budget absorption at the Jepara District Health Office. The research sample was 44 respondents who held positions in areas related to the budget, including Financial Administration Officers, Committee Making Officers, Technical Implementation Officers, Expenditure Treasurers, and implementing activities at the Jepara District Health Office. The results of the study using multiple linear regression showed that planning documents, administrative records, human resource competencies, and procurement documents had a significant influence on budget absorption. While the money supply does not affect the absorption of the budget.*

**Keywords:** *Planning Documents, Procurement Documents, Human Resources Competence, Administration Records, Budget Absorption, Inventory Money*

### *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dokumen pengadaan dan uang persediaan terhadap penyerapan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Sampel penelitian adalah 44 responden yang menduduki jabatan di bidang yang berkaitan dengan anggaran, diantaranya adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komiten, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan pelaksana kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Hasil penelitian dengan regresi linier berganda menunjukkan dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi sumber daya manusia dan dokumen pengadaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan uang persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.*

**Kata Kunci:** *Dokumen Perencanaan, Dokumen Pengadaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pencatatan Administrasi, Penyerapan Anggaran, Uang Persediaan*

ISSN: 2548-5644 (online) 1693-8275 (Print)

DOI: -

*Corresponding author:*

*Fatchur Rohman*

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

*Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara*

*fatchur@unisnu.ac.id*

## PENDAHULUAN

Kabupaten Jepara merupakan kabupaten yang sedang meningkatkan pembangunan di berbagai sektor untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, pariwisata, transportasi, infrastruktur serta fasilitas umum lainnya. Oleh karenanya peran pemerintah sangat dibutuhkan, sehingga dapat mendorong penguatan dan percepatan bagi pergerakan perekonomian. Upaya pemerintah ini direalisasikan dalam bentuk pencapaian pengelolaan potensi-potensi daerah dan sumber daya masyarakat yang memberi dampak bagi masyarakat. Hal tersebut jika dilakukan secara efektif dan efisien, maka tujuan penyelenggaraan pemerintah akan terlaksana dengan baik. Akan tetapi pada kenyataannya, peningkatan kesejahteraan masyarakat belum memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyaknya kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.

Sumber-sumber penerimaan daerah yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Kegagalan target penyerapan anggaran mengindikasikan telah terjadinya inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran (Carsidiawan, 2009). Belanja pemerintah menjadi pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi. Semakin awal pelaksanaan kegiatannya, akan memberi manfaat dan efek stimulus yang besar bagi kepentingan masyarakat. Jika pelaksanaannya mundur ke akhir tahun padahal seharusnya dilaksanakan lebih awal, maka yang dirugikan adalah masyarakat banyak karena tertunda menerima manfaat (Lestari, 2017).

Setiap tahun pemerintah daerah menyusun rencana keuangan tahunan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) adalah merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik (Bastian, 2006). Didalam Proses penyusunan anggaran pasca UU 22 Tahun 1999 dan telah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Penyusunan Anggaran melibatkan dua pihak yaitu: Lembaga eksekutif dan Lembaga legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Lembaga eksekutif sebagai lembaga pemerintah pelaksana operasionalisasi di daerah berkewajiban membuat daftar/rancangan APBD, yang dapat diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran (Sari, 2007).

Dalam struktur APBD pengeluaran pemerintah yang mendukung dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat tercermin didalam belanjanya, baik belanja modal maupun belanja barang dan jasa. Semakin besar belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 menyebutkan bahwa penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator evaluasi kinerja atas aspek implementasi. Penyerapan anggaran juga merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyerapan anggaran yang terlambat ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, terutama untuk jenis belanja barang/jasa dan belanja modal. Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktifitas kerja, peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas makro ekonomi. Keterlambatan penyerapan anggaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya meliputi kesiapan instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan, pemahaman instansi pemerintah dalam mekanisme pelaksanaan pencairan anggaran, proses dalam pengadaan barang dan jasa, dan berbagai faktor lainnya.

Sebagaimana penelitian Nugroho & Alfarisi (2017) yang menunjukkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada instansi pemerintah yaitu faktor perencanaan, faktor pelaksanaan anggaran, faktor Sumber Daya Manusia (SDM), faktor pengadaan barang/jasa dan faktor koordinasi dengan sektor atau instansi lain. Sejalan dengan hal tersebut (Meyulinda Aviana Elim, Deasy Susana Ndaparoka, 2018) menyatakan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen serta

lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Kupang. Mutmainna & Iqbal (2017) juga menyebutkan faktor pergantian pimpinan, dokumen perencanaan, kompetensi SDM dan dokumen pengadaan mempengaruhi penyerapan anggaran di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu (Putri, 2014) menyatakan terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu faktor kompetensi SDM, faktor dokumen pengadaan, faktor Ganti Uang Persediaan (GUP) sedangkan faktor perencanaan dan pencatatan administrasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali apakah dengan teori yang sama, tetapi pada waktu dan tempat yang berbeda akan memberikan hasil yang sama atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dengan menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran dimana peneliti meneliti di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Peneliti juga memfokuskan penyerapan anggaran setelah revisi perubahan anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara”.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian *stakeholder* Freeman dan Reed (Ulum, 2009) adalah “sekelompok orang atau individu yang di identifikasikan dapat mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh suatu tujuan pencapaian tertentu”. Para pemegang saham, para supplier, bank, para customer, pemerintah dan komunitas memegang peranan penting dalam organisasi (berperan sebagai stakeholder).

Anggaran merupakan salah satu alat vital suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Anggaran merupakan sarana utama untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan dalam setiap perusahaan. Rencana ini biasanya mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan suatu pendekatan formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi dan pengendalian.

Dalam pasal 14 ayat (6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 telah disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. “Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran” (Mardiasmo, 2009).

Penyerapan anggaran memiliki pengaruh terhadap pengelolaan fungsi perbendaharaan dan ekonomi makro. Sedangkan penyerapan anggaran itu sendiri merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Supranggono, 2009). Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres nomor 42 tahun 2002 (Kuncoro, 2013).

Murwanto dalam (Hendris, 2012) APBN adalah rencana tahunan keuangan pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang berisi daftar sistematis dan terperinci atas rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari–31 Desember) dan ditetapkan dengan Undang-Undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rasio realisasi penyerapan belanja kementerian atau lembaga terhadap pagu anggaran belanja merupakan suatu bentuk indikator efektivitas belanja negara. Selain itu kebijakan APBN diharapkan dapat merespon dinamika rakyat

baik yang terkait dengan perkembangan perekonomian secara luas, maupun kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang bersifat fleksibel (Rahayu, 2011).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu ada dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetisi sumber daya manusia, dokumen pengadaan, dan uang persediaan.

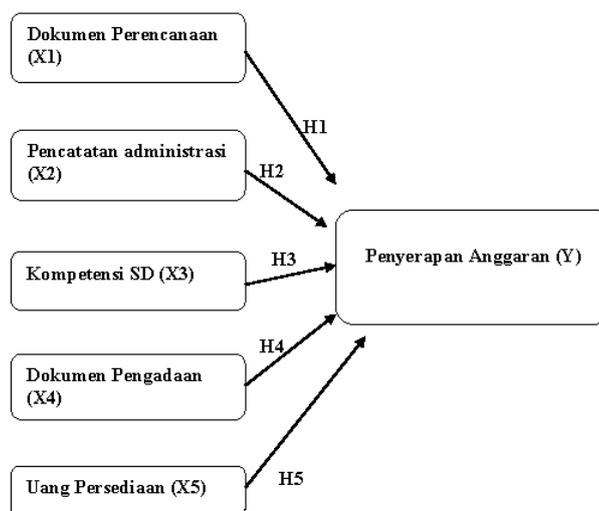
Dokumen perencanaan adalah dokumen yang memuat suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dokumen perencanaan di daerah menurut Pinto (2013) terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ratna, 2019).

Administrasi dalam arti sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan” (Handayani, 1998). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Indikator didalam kegiatan pencatatan administrasi yaitu Kesalahan dalam penentuan rekening, Masa penyusunan dan penelaahan anggaran, Perubahan anggaran atas dasar memo dari Kepala Daerah, Masa Verifikasi anggaran oleh Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD), Pemahaman terhadap peraturan mengenai mekanisme pembayaran (Putri, 2014).

Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap dan bertindak,serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu (Moehariono, 2009). Menurut Nawawi (2010) ada tiga pengertian Sumber Daya Manusia yaitu: (1) Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan). (2) Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. (3) Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Pengadaan barang/jasa berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 adalah “kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”.Metode pemilihan penyedia merupakan salah satu dari proses pelaksanaan pengadaan yang ditetapkan pada tahapan perencanaan. Metode pemilihan penyedia menjadi tanggung jawab dari Pokja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau pejabat pengadaan dalam memutuskan metode apa yang akan dipakai guna mendapatkan barang/jasa yang diperlukan oleh K/L/PD tersebut. Indikator pada dokumen pengadaan ini antara lain: (1) Mutasi pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan. (2) Proses penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung atau dapat diartikan kegiatan yang sifatnya insidental/mendesak (Kementerian Keuangan RI, 2020). Hal ini wajib dipahami oleh pengelola keuangan baik KPA, PPK, PPTK, PP SPM dan Bendahara Pengeluaran. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Yang menjadi indikator Uang Persediaan yaitu: (1) Keterlambatan pengajuan pembayaran kegiatan. (2) Pengajuan UP dilakukan dua kali. (3) Sisa UP/TUP harus disetorkan ke kas daerah.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis**

**METODE**

Metode penelitian merupakan suatu penelitian analisis yaitu penelitian survey yang bertujuan untuk mengumpulkan data, menyusun data, menganalisis data, menginterpretasikan data dan akhirnya pada kesimpulan yang didasarkan pada analisa data.

Pengukuran variabel penelitian dilakukan dengan memberikan definisi operasional sebagai indikator penelitian dari masing-masing variabel. *Variabel independen* merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini terdapat lima variable independen yaitu dokumen perencanaan, pencatatan admnistrasi, kompetisi sumber daya manusia, dokumen pengadaan, dan uang persediaan. *Variabel dependen* merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Nama lain dari variabel ini adalah variabel yang diduga sebagai akibat atau variabel konsekuensi (Indriantoro, 2002). *Variabel dependen* dalam penelitian ini adalah penyerapan anggaran.

Data primer adalah data yang di kumpulkan dan di olah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakan. (Arsyad, 1999). Data sekunder merupakan data yang bukan di usahakan sendiri oleh penulis melainkan melalui biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. (Marzuki, 2002). Data merupakan salah satu unsur yang penting dalam menyusun laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner kepada responden.

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah dari jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah delapan puluh pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Teknik dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik pengumpulan data secara purposive sampling, yaitu untuk memperoleh sampel yang memenuhi kriteria tertentu dibutuhkan karakteristik sampling. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang menduduki jabatan dibidang yang berkaitan dengan anggaran yaitu PA (Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), PP SPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar), Bendahara Pengeluaran, dan masing-masing pelaksana kegiatan, sehingga jumlah sampel menjadi 44 responden. Sampel diambil di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

## HASIL

### Deskripsi Variabel

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik variabel penelitian, antara lain mean, dan standar deviation. Pengukuran rata-rata (mean) merupakan cara yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai interval dari suatu distribusi data, rata-rata hitung (mean) dari sekelompok atau serangkaian data adalah jumlah dari seluruh nilai data dibagi dengan banyak data. Standar deviasi merupakan perbedaan nilai data yang diteliti dengan rata-rata hitung sekelompok data tersebut. Adapun hasil statistik deskriptif setiap variabel dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Deskripsi Variabel**

VARIABEL	N	MEAN	STD. DEVIATION
Penyerapan Anggaran (Y)	44	10,00	1,988
Dokumen Perencanaan (x1)	44	24,23	8,744
Pencatatan Administrasi (x2)	44	17,98	7,060
Kompetensi SDM (x3)	44	8,30	2,041
Dokumen Pengadaan (x4)	44	9,07	1,946
Uang Persediaan (x5)	44	8,82	1,618

Sumber: data primer diolah tahun 2019

Berdasar tabel diatas variabel diatas penyerapan anggaran (Y) memiliki rata-rata (mean) sebesar 10,00 dengan standar deviasi 1,988. Variabel dokumen perencanaan (X1) memiliki rata-rata 24,23 dengan standar deviasi 8,744. Variabel pencatatan administrasi (X2) memiliki rata-rata 17,98 dengan standar deviasi 7,060. Variabel Kompetensi SDM (X3) memiliki rata-rata 8,30 dengan standar deviasi 2,041. Variabel dokumen pengadaan (X4) memiliki rata-rata 9,07 dengan standar deviasi 1,946. Variabel uang persediaan (X5) memiliki rata-rata 8,82 dengan standar deviasi 1,618.

### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, Sedangkan kriteria untuk menyimpulkan data bersifat valid atau tidak adalah:

- a. Jika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka item pertanyaan bersifat valid.
- b. Jika nilai  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka item pertanyaan tidak valid dan pertanyaan tersebut harus dikeluarkan dari analisis.

Nilai  $r_{tabel}$  pada penelitian analisis faktor-aktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara ini dengan tingkat keyakinan 95% dan sampel (n) = 44 responden dan tingkat kesalahan 5% didapat sebesar 0,296. Dalam uji validitas ini yang diuji item pertanyaan untuk variabel dokumen perencanaan sebanyak 9 pertanyaan, item pertanyaan untuk variabel pencatatan administrasi sebanyak 6 pertanyaan, item pertanyaan untuk variabel kompetensi SDM sebanyak 3 pertanyaan, item pertanyaan untuk variabel dokumen pengadaan sebanyak 3 pertanyaan, item pertanyaan untuk variabel uang persediaan sebanyak 3 pertanyaan, dan item pertanyaan untuk variabel penyerapan anggaran sebanyak 3 pertanyaan, nilai  $r_{hitung}$  diperoleh dari nilai *Corrected item-Total Correlation* pada output *reliability* dari olahan SPSS adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Pengujian Validitas Indikator-Indikator Penelitian**

Variabel	Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
Dokumen perencanaan	x11	.548	0,296	Valid
	x12	.328	0,296	Valid
	x13	.508	0,296	Valid
	x14	.328	0,296	Valid
	x15	.568	0,296	Valid
	x16	.628	0,296	Valid
	x17	.913	0,296	Valid
	x18	.910	0,296	Valid
	x19	.913	0,296	Valid
Pencatatan administrasi	x21	.586	0,296	Valid
	x22	.621	0,296	Valid
	x23	.799	0,296	Valid
	x24	.838	0,296	Valid
	x25	.497	0,296	Valid
	x26	.590	0,296	Valid
Kompetensi SDM	x31	.328	0,296	Valid
	x32	.764	0,296	Valid
	x33	.780	0,296	Valid
Dokumen pengadaan	x41	.377	0,296	Valid
	x42	.409	0,296	Valid
Uang persediaan	x43	.600	0,296	Valid
	x51	.306	0,296	Valid
	x52	.910	0,296	Valid
Penyerapan anggaran	x53	.750	0,296	Valid
	y1	.590	0,296	Valid
	y2	.913	0,296	Valid
	y3	.687	0,296	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai  $r_{hitung}$  indikator-indikator variabel penelitian yang ditanyakan kepada responden memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai  $r_{tabel}$  (0,296) dengan demikian dapat dikatakan bahwa instrumen seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini valid dan dapat digunakan dalam pengambilan data. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator pada penelitian ini bersifat valid dan bisa digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

### Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan kata lain bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda terhadap pernyataan dengan instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,60 (*Cronbach alpha* > 0,6.). Dari hasil pengujian reliabilitas pada variabel-variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 3:

**Tabel 3. Pengujian Reliability Indikator-Indikator Penelitian**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.873	27

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai cronbach alpha adalah 0,873. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian bersifat reliabel atau andal dan kuesioner tersebut dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Hal ini dibuktikan dengan nilai cronbach alpha > 0,60.

### Analisis Regresi Berganda

Digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel X (dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi SDM, dokumen pengadaan, dan uang persediaan) secara bersama-sama terhadap variabel Y (penyerapan anggaran). Berikut ini hasil persamaan regresi berganda hasil perhitungan SPSS yang disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Analisis Regresi**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.002	1.806		3.878	.000
	Dokumen Perencanaan (x1)	.733	.030	.647	4.115	.022
	Pencatatan administrasi (x2)	.280	.038	.286	2.128	.040
	Kompetesi SDM (x3)	.591	.145	.502	2.707	.010
	Dokumen Pengadaan (x4)	.424	.149	.415	2.854	.007
	Uang Persediaan (x5)	.052	.182	.124	.838	.407

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Bentuk persamaan regresi berganda diatas berdasarkan nilai *Unstandardized coefficients* adalah sebagai berikut:

$$Y = 7,002 + 0,733X_1 + 0,280X_2 + 0,591X_3 + 0,424X_4 + 0,052X_5$$

Dari hasil persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yaitu:

Nilai konstanta sebesar 7,002 berarti jika dokumen perencanaan (x1), pencatatan administrasi (x2), kompetensi SDM (x3), dokumen pengadaan (x4), dan uang persediaan (x5) sama dengan nol, maka nilai penyerapan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara sebesar 7,002 poin.

Nilai regresi untuk variabel dokumen perencanaan ( $X_1$ ) adalah 0,733 berarti mempunyai pengaruh yang positif, artinya setiap perubahan naiknya variabel dokumen perencanaan akan mempengaruhi perubahan naiknya penyerapan anggaran (Y) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara sebesar 0,733 poin, dengan asumsi norma subyektif (x2, x3, x4, dan x5) konstan.

Nilai regresi untuk variabel pencatatan administrasi ( $X_2$ ) adalah 0,280, berarti mempunyai pengaruh yang positif, artinya setiap perubahan naiknya variabel pencatatan administrasi akan mempengaruhi perubahan naiknya penyerapan anggaran (Y) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara sebesar 0,280 poin, dengan asumsi norma subyektif (x1, x3, x4, dan x5) konstan.

Nilai regresi untuk variabel kompetensi SDM ( $X_3$ ) adalah 0,591, berarti mempunyai pengaruh yang positif, artinya setiap perubahan naiknya variabel kompetensi SDM akan mempengaruhi perubahan naiknya penyerapan anggaran (Y) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara sebesar 0,591 poin, dengan asumsi norma subyektif ( $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_4$ , dan  $x_5$ ) konstan.

Nilai regresi untuk dokumen pengadaan ( $X_4$ ) adalah 0,424, berarti mempunyai pengaruh yang positif, artinya setiap perubahan naiknya variabel dokumen pengadaan akan mempengaruhi perubahan naiknya penyerapan anggaran (Y) pada Dinas Kesehatan kabupaten Jepara sebesar 0,424 poin, dengan asumsi norma subyektif ( $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ , dan  $x_5$ ) konstan.

Nilai regresi untuk variabel Uang Persediaan ( $X_5$ ) adalah 0,052, berarti mempunyai pengaruh yang positif, artinya setiap perubahan naiknya variabel uang persediaan akan mempengaruhi perubahan naiknya penyerapan anggaran (Y) pada Dinas Kesehatan kabupaten Jepara sebesar 0,052 poin, dengan asumsi norma subyektif ( $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ , dan  $x_4$ ) konstan.

### Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dipergunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Jika angka koefisien determinasi mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat. Hal tersebut berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang kecil variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas (Ghozali, 2011).

Berdasar hasil perhitungan, terlihat nilai koefisien determinasi Adjusted R square ( $R^2$ ) = 0,788. Hal ini mengandung pengertian bahwa 78,8 % variabel penyerapan anggaran dapat dijelaskan oleh variabel dokumen perencanaan ( $X_1$ ), pencatatan administrasi ( $X_2$ ), kompetensi SDM ( $X_3$ ), dokumen pengadaan ( $X_4$ ) dan uang persediaan ( $X_5$ ) sedangkan sisanya sebesar 21,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk ke dalam penelitian.

Nilai *Adjusted R Square* untuk dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi SDM, dokumen pengadaan, dan uang persediaan terhadap penyerapan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara berdasarkan perhitungan SPSS dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

**Tabel 5. Nilai Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.709 <sup>a</sup>	.871	.788	1.678

a. Predictors: (Constant), Uang Persediaan, Dokumen Perencanaan, Pencatatan Administrasi, Dokumen Pengadaan, Kompetensi SDM

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

### Uji Kelayakan Model (F test)

Uji kelayakan model dilakukan dengan uji F (F test). Pengujian yang dilakukan untuk menguji adanya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Adapun hasil perhitungan pengujian Uji F dengan SPSS dapat dilihat pada Tabel 7 adalah sebagai berikut

**Tabel 6. Nilai Uji Kelayakan Model f**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	63,030	5	112,606	144,478	,003 <sup>b</sup>
	Residual	106,970	38	2,815		
	Total	170,000	43			

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

b. Predictors: (Constant), Uang Persediaan, Dokumen Perencanaan, Pencatatan Administrasi, Dokumen Pengadaan, Kompetensi SDM

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa  $F_{hitung}$  ditunjukkan sebesar 144,478 sedangkan nilai  $F_{tabel}$  dengan  $n = 44 - 5 - 1 = 38$  dan *level of significant* ( $\alpha$ ) = 0,05 sehingga diperoleh  $F_{tabel} = 2,46$ . Sehingga  $F_{hitung} = 144,478 > F_{tabel} = 2,46$ . Dan nilai signifikan  $0,003 < 0,05$ . Nilai-nilai tersebut berarti variabel dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi SDM, dokumen pengadaan dan uang persediaan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

### Uji T test

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian dilakukan berdasarkan probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha$ ), maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Adapun hasil perhitungan pengujian Uji T dengan SPSS dapat dilihat pada Tabel 8 adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Nilai Uji t Test**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7,002	1,806		3,878	,000
	Dokumen Perencanaan	,733	,030	,647	4,115	,022
	Pencatatan Administrasi	,280	,038	,286	2,128	,040
	Kompetensi SDM	,591	,145	,502	2,707	,010
	Dokumen Pengadaan	,424	,149	,415	2,854	,007
	Uang Persediaan	,052	,082	,024	,838	,407

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa : tingkat signifikansi variabel dokumen perencanaan (0,022) lebih kecil dari tingkat signifikan (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

Uji statistik menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel pencatatan administrasi (0,040) kurang dari tingkat signifikan (0,05). Hal ini membuktikan bahwa pencatatan administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

Tingkat signifikansi variabel kompetensi sumber daya manusia (0,010) kurang dari tingkat signifikan (0,05). Hal ini membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara

Uji statistik menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel dokumen pengadaan (0,007) kurang dari tingkat signifikan (0,05). Hal ini membuktikan bahwa dokumen pengadaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

Uji statistik menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel uang persediaan (0,407) lebih dari tingkat signifikan (0,05). Hal ini membuktikan bahwa uang persediaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara

## PEMBAHASAN

Dari hasil analisis regresi berganda didapat persamaan  $Y = 7,002 + 0,733X_1 + 0,280X_2 + 0,591X_3 + 0,424X_4 + 0,052X_5$ . Dari persamaan tersebut menunjukkan koefisien regresi untuk variabel dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dokumen pengadaan dan uang persediaan positif, artinya setiap perubahan naiknya variabel tersebut akan mempengaruhi perubahan naiknya penyerapan anggaran (Y) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

Sedangkan dari analisis *Adjusted r Square* diketahui variabel pencatatan administrasi, kompetensi SDM, dan dokumen pengadaan mempengaruhi perubahan terhadap penyerapan anggaran sebesar 78,8%, sedangkan yang 21,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian tersebut di atas, misalnya budaya kerja, komitmen manajemen, lingkungan birokrasi dan lain sebagainya.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji F ditunjukkan dengan  $F_{hitung} = 144,478$  lebih dari  $F_{tabel} = 2,46$  dengan nilai signifikan 0,003 kurang dari  $\alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak sedangkan  $H_a$  diterima. Berarti hasil pengujian hipotesis tersebut mendukung kebenaran dari hipotesis yang menyatakan, bahwa: "Ada pengaruh positif antara dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi SDM dan dokumen pengadaan secara bersama-sama terhadap penyerapan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

Hasil pengujian hipotesis uji t untuk pengaruh dokumen perencanaan terhadap penyerapan anggaran menunjukkan nilai t-statistik berada pada kisaran 4,115 dengan nilai signifikan 0,022 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil ini menunjukkan dokumen perencanaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Artinya baik atau buruknya dokumen perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Putri, 2014) yang menyatakan bahwa dokumen perencanaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Hasil pengujian hipotesis uji t untuk pengaruh pencatatan administrasi terhadap penyerapan anggaran menunjukkan nilai t-statistik berada pada kisaran 2,128 dengan nilai signifikan 0,040 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil ini menunjukkan pencatatan administrasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Artinya baik atau buruknya sistem pencatatan administrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Nilai koefisien regresi sebesar 0,280 mengandung makna bahwa setiap peningkatan 1 satuan pencatatan administrasi akan meningkatkan 0,280 penyerapan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Artinya, semakin baik sistem pencatatan administrasi disusun maka penyerapan anggaran akan semakin tinggi. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Putri (2014) yang memberikan hasil bahwa pencatatan administrasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Hasil pengujian hipotesis uji t untuk pengaruh kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran menunjukkan t-statistik berada pada kisaran 2,707 dengan nilai signifikan 0,010 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara berpengaruh terhadap penyerapan

anggaran. Nilai koefisien regresi sebesar 0,591 mengandung makna bahwa setiap peningkatan 1 satuan kompetensi SDM akan meningkatkan 0,591 penyerapan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Semakin tinggi tingkat kompetensi SDM dalam sebuah SKPD maka akan menyebabkan tingkat penyerapan anggaran tinggi. Ini berarti semakin memadai kompetensi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kesehatan kabupaten Jepara maka akan semakin meningkatkan penyerapan anggaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2014) yang menyebutkan adanya pengaruh kompetensi SDM terhadap serapan anggaran. Hasil penelitian ini semakin menguatkan pentingnya bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara untuk terus meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki, terutama yang berhubungan dengan anggaran, seperti penyusun anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat/panitia pengadaan, bendahara, dan lain-lain.

Hasil pengujian hipotesis uji t untuk pengaruh dokumen pengadaan terhadap penyerapan anggaran menunjukkan t-statistik berada pada kisaran 2,854 dengan nilai signifikan 0,007 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa dokumen pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Nilai koefisien regresi sebesar 0,424 mengandung makna bahwa setiap peningkatan 1 satuan dokumen pengadaan akan meningkatkan 0,424 penyerapan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Semakin baik dan lengkap dokumen pengadaan dalam sebuah SKPD maka akan meningkatkan penyerapan anggaran. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2014) yang menyebutkan adanya pengaruh dokumen pengadaan terhadap serapan anggaran.

Hasil pengujian hipotesis uji t untuk pengaruh uang persediaan terhadap penyerapan anggaran menunjukkan t-statistik berada pada kisaran 0,838 dengan nilai signifikan 0,407 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa ketersediaan uang persediaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tidak mempengaruhi penyerapan anggaran. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2014) yang menunjukkan bahwa uang persediaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

## SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dapat disimpulkan Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara dokumen perencanaan terhadap penyerapan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan  $0,022 < 0,05$ . Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pencatatan administrasi terhadap penyerapan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan  $0,040 < 0,05$ . Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan  $0,010 < 0,05$ . Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara dokumen pengadaan terhadap penyerapan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan  $0,007 < 0,05$ . Tidak terdapat pengaruh antara uang persediaan terhadap penyerapan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan  $0,407 > 0,05$ .

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mencoba menyampaikan beberapa saran yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan anggaran yang efektif: Dalam hal perencanaan, sebaiknya perencanaan kegiatan dipersiapkan secara matang mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan, anggaran yang dibutuhkan serta jadwal pelaksanaannya oleh para pelaksana kegiatan dan perencanaan kegiatan tersebut harus sejalan dengan perencanaan penganggarnya agar pada saat pelaksanaan kegiatan tidak terkendala oleh anggaran yang belum tersedia atau harus menunggu anggaran yang perlu direvisi. Keterbatasan SDM dalam pengelolaan keuangan mengakibatkan penumpukan pekerjaan termasuk dalam hal pelaksanaan anggaran. Dalam membagi pegawai baru atau mutasi pegawai sebaiknya mempertimbangkan beban kerja masing-masing subbag/seksi

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Carsidiawan, D. (2009). Mengungkap penyebab lambatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah. *Buletin Anggaran Dan Perbendaharaan [Buletin "A&P"]*.
- Handayani, S. (1998). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Hendris, H. (2012). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Lembaga/Kementrian di Wilayah Jakarta*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Indriantoro, N. dan B. S. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis. Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kuncoro, D. E. (2013). Analisis Penyerapan Anggaran Pasca Penerapan Aplikasi Sipp Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Dinas Pu Prov. Kaltim. *E-Journal Administrasi Bisnis*, 1(4), 364–373.
- Lestari, N. L. P. D. (2017). *Kemampuan Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi SDM Pada Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan*. Universitas Udayana Denpasar.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Marzuki. (2002). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetya Widi Pratama.
- Meyulinda Aviana Elim, Deasy Susana Ndaparoka, T. E. D. T. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Audit*, 3(2), 46–56.
- Moehariono. (2009). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Mutmainna, & Iqbal, M. (2017). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Assets*, 7(1), 120–132.
- Nawawi. (2010). *Perencanaan SDM untuk Organisasi Profit yang Kompetitif*. Yogyakarta: GM University Press.
- Nugroho, R., & Alfarisi, S. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). *Jurnal BPPK*, 1(1), 22–37.
- Putri, C. T. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Provinsi Bengkulu*. Universitas Bengkulu.
- Rahayu, S. (2011). Studi Fenomenologis terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah (Bukti Empiris dari satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Jambi). *Paper Dipresentasikan Pada Simposium Nasional Akuntansi X*.

- Ratna, I. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU. *Jurnal EL-RIYASAH*, 9(1), 35. <https://doi.org/10.24014/jel.v9i1.6836>
- RI, K. K. (2020). Pembayaran Uang Persediaan Tunai.
- Sari, D. & Y. Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007*.
- Supranggono, L. (2009). *Evaluasi terhadap Penyerapan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga*. STAN Jakarta.
- Ulum, I. (2009). *Intellectual Capital Konsep dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.